

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
KERJASAMA PENGELOLAAN LAHAN
DI HUTAN KAWASAN
(Studi Kasus Pada Hutan Kawasan, Register 17, Kelurahan
Serengsem, Panjang, Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**SANGON RAGAH SETIA
NPM : 1721030070**



Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
KERJASAMA PENGELOLAAN LAHAN
DI HUTAN KAWASAN
(Studi Kasus Pada Hutan Kawasan Register 17 Kelurahan
Serengsem, Panjang, Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum S1
Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah**



**Oleh
Sangon Ragah Setia
NPM 1721030070**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**Pembimbing I: Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.H
Pembimbing II: Anis Sofiana, M.S.I**

**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

ABSTRAK

Di Register 17 Kelurahan Serengsem terdapat hutan kawasan yang sudah menjadi hutan kemasyarakatan di mana setiap orang bisa memanfaatkan lahan di hutan kawasan itu untuk bertani atau berkebun dengan mengurus surat persil terlebih dahulu agar mendapat izin mengelola lahan di sana, beberapa orang memanfaatkan lahan di hutan kawasan tersebut dengan bekerja sama untuk mengelola lahan di sana dengan berbagai alasan. Praktik kerjasama yang terjadi di hutan kawasan Register 17 Kelurahan Serengsem merupakan kerjasama dalam pengelolaan lahan di hutan kawasan antara pemilik izin lahan dan pengelola lahan dalam hal ini mengambil bentuk *mukhabarah*. Kerjasama yang dilakukan menggunakan akad secara lisan di mana pihak pemilik izin lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola oleh pengelola sesuai dengan akad diawal dan pembagian hasil yang ditentukan setelah masa panen selesai. Kerjasama yang dilakukan mengakibatkan beberapa masalah dalam jangka waktu kerjasama dan dalam bagi hasil yang tidak sesuai dengan kerjasama pada umumnya karena mengedepankan asas kekeluargaan dan saling percaya tanpa mempertimbangkan masalah yang akan timbul dikemudian hari.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik kerjasama dalam pengelolaan lahan pada hutan kawasan di Register 17 Kelurahan Serengsem Panjang Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik kerjasama pengelolaan lahan pada hutan kawasan di Register 17 Kelurahan Serengsem Panjang Bandar Lampung. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik kerjasama dalam pengelolaan lahan pada hutan kawasan di Register 17 Kelurahan Serengsem Panjang Bandar Lampung dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik kerjasama pengelolaan lahan pada hutan kawasan di Register 17 Kelurahan Serengsem Panjang Bandar Lampung. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan tempat penelitian dan data sekunder yang didapat dari pengumpulan data melalui buku, jurnal dan sumber lain yang dapat dipercaya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk kerjasama yang digunakan merupakan kerjasama *mukhabarah* di mana pihak pengelola hanya mengizinkan lahannya untuk ditanami sedangkan

pengelola lahan yang menyiapkan benih, merawat lahan, dan mengumpulkan hasil panen. Dalam kerjasama ini perjanjian bagi hasil yang dilakukan setelah panen dengan pembagian 2:1 dalam bagi hasil ini 4 dari 9 pihak pengelola merasa tidak puas karena tidak sesuai dengan apa yang telah di kerjakan oleh pengelola lahan. Ditinjau dari hukum Islam praktik kerjasama pengelolaan lahan pada hutan kawasan di Register 17 Kelurahan Serengsem merugikan 4 dari 9 pihak pengelola lahan karena pembagian hasil yang tidak sesuai dengan apa yang sudah mereka kerjakan maka kerja sama ini dilarang dalam Islalm.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sangon Ragah Setia
NPM : 1721030070
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain;
3. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
4. Mengerjakan sendiri karya ilmiah ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 21 September 2021

Yang menyatakan



Sangon Ragah Setia
NPM 1721030070



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame - Bandar Lampung 35131 Tlp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
KERJASAMA PENGELOLAAN LAHAN DI HUTAN
KAWASAN (Studi Kasus Pada Hutan Kawasan Register 17
Desa Serengsem, Panjang, Bandar Lampung)**

Nama : Sangon Ragah Setia

NPM : 1721030070

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.H

NIP.197012282000031002

Anis Sofiana, M.S.I

NIP.1989102520190320009

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Pengelolaan Lahan di Hutan Kawasan** (Studi Kasus pada Hutan Kawasan Register 17, Kelurahan Serengsem, Panjang, Bandar Lampung) disusun oleh Sangon Ragah Setia, NPM. 1721030070 Program Studi Muamalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Jum'at, 8 Oktober 2021.

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

(.....)

Sekretaris : Juhrotul Khulwah, M.S.I.

(.....)

Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji III : Anis Sofiana, M.S.I. (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. K.H. Khairuddin, M.H
NIP. 19621022199303100

MOTTO

أَنَّهُ يُحَا بِرُقَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتُ هَذِهِ الْمَخَابِرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الْمَخَابِرَةَ فَقَالَ أَخْبِرْنِي أَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرُهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا.

(رواه مسلم)

“Sesungguhnya Thawus r.a. bermukhabarah, Umar r.a. berkata; dan aku berkata kepadanya; ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi melarangnya. Kemudian Thawus berkata; telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw. Tidak melarang mukhabarah, hanya beliau berkata, bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah dimaklumi.” (HR.Muslim)

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah Kepada Allah SWT, karya ilmiah ini merupakan wujud dari upaya kecil untuk mengharapakan rahmat dan ridho-Nya. Kulangkahkan kakiku menuju kesuksesan, benturan demi benturan terus kulalui untuk meraih cita-cita yang kudambakan. Kupersembahkan karya ini, untuk cahaya hidup yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selain setia mendampingi saat aku lemah dengan segala kekacauan pikiranku. Sebagai ucapan terimakasih cinta dan kasih sayang yang tulus, kupersembahkan karya ilmiah (skripsi) ini kepada:

- Ibuku tercinta Almh. Hadijah, kau telah meninggalkan dunia ini, namun ajaran dan kasih sayangmu sewaktu aku kecil telah membentukku menjadi seorang anak dan seorang abang yang kuat untuk menjalani hidup didunia ini, terimakasih ibu untuk cinta dan kasih sayangmu yang selalu menjadi penyemangatku.
- Ayahku tercinta Zainuri, kau selalu mengirimiku kekuatan melalui kata-kata motivasi dan untaian doamu. Kau telah begitu kuat dan tegar dalam menghadapi hidup ini, setiap tetes keringatmu selalu jadi semangatku untuk meraih cita-cita, hari-harimu yang penuh tantangan dan pengorbanan, ayah kau adalah pelita dan pahlawan dalam hidupku.
- Neneku tercinta Nurlaila, yang tak pernah bosan untuk terus mengingatkan ku disaatku mulai lalai dan selalu menyemangatiku saat aku mulai merasa lelah menjalani aktivitas pendidikanku, kau adalah penyemangatku cintamu selalu hiasi jiwaku dan restumu temani hidupku.
- Almater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tercinta.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Sangon Ragah Setia, dilahirkan di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Tenggarong, Kalimantan Timur, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 1999. Putra sulung dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Zainuri dan Almh.Ibu Hadijah. Adapun pendidikan yang pernah ditempuh sebagai berikut:

1. Taman kanak-kanak di TK Gelatik Tiga Muara Jawa tahun 2003 dan selesai pada tahun 2005;
2. Sekolah Dasar di SD Negeri 012 Muara Jawa pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2011;
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SMP Negeri 1 Muara Jawa pada tahun 2011 lalu pindah sekolah ke SMP Negeri 2 Blambangan Umpu pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2014;
4. Sekolah Lanjutan Menengah Atas di SMA Negeri 1 Blambangan Umpu pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017;
5. Selanjutnya melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) pada tahun 2017 sampai dengan sekarang.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis diberi kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Pengelolaan Lahan di Hutan Kawasan** (Studi Kasus Pada Hutan Kawasan, Register 17, Kelurahan Serengsem, Panjang, Bandar Lampung) sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Sholawat beriring salam yang senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan umat Islam, Nabi Muhammad SAW yang mulia, kepada keluarganya dan para sahabatnya.

Penulisan skripsi ini, penullis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Yth:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung, Bapak Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag. beserta Wakil Rektor I, II, dan III yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H. beserta Wakil Dekan I, II dan III serta seluruh staf pengajar dan seluruh pegawai Fakultas Syariah yang telah membantu penulis dalam pengurusan adminitrasi selama penulisan skripspi ini;
3. Ketua Prodi Muamalah Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Sekretaris Prodi Muamalah Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I serta seluruh karyawan dan dosen yang telah memberikan kemudahan dan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis mengikuti perkuliahan di prodi muamalah;
4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.H selaku pembimbing I dan Ibu Anis Sofiana, M.S.I selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu

- dan pikiran serta membimbing dan memberikan banyak arahan kepada penulis hingga akhir penulisan skripsi ini;
5. Dosen dan staff sivitas Fakultas Syari'ah yang telah membimbing penulis serta memberikan kemudahan dalam mengurus segala keperluan penulis yang berhubungan dengan Fakultas Syari'ah.
 6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung Bapak Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H dan staff perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan mempermudah peminjaman buku di perpustakaan.
 7. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu, keluarga besar Muamalah F Angkatan 2017;
 8. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Moot Court Community (UKM-F MCC) UIN Raden Intan Lampung;
 9. Teruntuk Adil, Faris, Riyandi dan Robi Agusta serta teman-teman yang selalu memberikan semangat pada penulis dalam proses pencapaian gelar;
 10. Teruntuk adik tingkat Hedy Nisa, Dea Hassya dan Kevin Almer yang selalu memberikan motivasi serta dukungan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu, demi perbaikan skripsi ini selanjutnya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman mengenai judul yang diusung.

Bandar Lampung, 03 Juli 2021
Penulis,

Sangon Ragah Setia
NPM. 1721030070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Akad.....	19
2. Rukun dan Syarat Akad	20
3. Macam-Macam Akad.....	21
4. Berakhirnya Akad	22
B. Kerjasama Dalam Pertanian (<i>Mukhabarah</i>)	
1. Pengertian <i>Mukhabarah</i>	23
2. Landasan Hukum <i>Mukhabarah</i>	24
3. Rukun dan Syarat <i>Mukhabarah</i>	25

4. Mekanisme Pembagian Hasil Dalam Mukhabarah.....	26
5. Berakhirnya Akad Mukhabarah.....	27
6. Hikmah Mukhabarah	28
C. Landasan Kehutanan	
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	28
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial	31

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Hutan Kawasan di Register 17 Kelurahan Serengsem Panjang Bandar Lampung....	33
B. Praktik Kerjasama Pengelolaan Lahan pada Hutan Kawasan Di Register 17 Kelurahan Serengsem Panjang Bandar Lampung	38

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Terhadap Praktik Kerjasama Dalam Pengelolaan Lahan pada Hutan Kawasan di Kelurahan Serengsem Panjang Bandar Lampung.....	43
B. Analisis Terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Dalam Pengelolaan Lahan pada Hutan Kawasan di Kelurahan Serengsem Panjang Bandar Lampung	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Rekomendasi	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Gabungan Kelompok Tani Register 17.....	39
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: SURAT KETERANGAN PENELITIAN

LAMPIRAN 2: PERTANYAAN UNTUK WAWANCARA

LAMPIRAN 3: TRANSKIP HASIL WAWANCARA

LAMPIRAN 4: TANDA TANGAN NARASUMBER

LAMPIRAN 5: DOKUMENTASI DI TEMPAT PENELITIAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam memaknai sebuah judul penelitian ini supaya mudah dan dapat dipahami, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan (*Fallacy*) dan terjadi kesalahpahaman, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah-istilah kata yang penting dalam judul penelitian ini. Judul penelitian ini adalah **Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Pengelolaan Lahan di Hutan Kawasan (Studi kasus pada hutan kawasan, Register 17, Kelurahan Serengsem, Panjang, Bandar Lampung)**. Adapun beberapa istilah kata yang perlu di jelaskan adalah sebagai berikut:

- 1) Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).¹ Sedangkan kata tinjauan dalam penelitian ini merupakan tinjauan yang di tinjau dari pandangan Hukum Islam.
- 2) Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat.² Jadi Hukum Islam diturunkan oleh Allah kepada seorang rosul yang kemudian disebar dan diajarkan kepada hamba-hambaNya.
- 3) Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

² Muchammad Ihsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Laboraturium Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), h. 2.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 681.

- 4) Pengelolaan adalah kegiatan atau proses yang terdiri atas proses panen pengeringan, pembersihan.⁴
- 5) Hutan Kawasan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 1 ayat (3) adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.⁵

Berdasarkan uraian penegasan judul di atas yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah penelitian yang mengkaji tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Pengelolaan Lahan di Hutan Kawasan (Studi Kasus Pada Hutan Kawasan, Register 17, Kelurahan Serengsem, Panjang, Bandar Lampung).

B. Latar Belakang Masalah

Allah SWT memerintahkan manusia bekerja dengan sungguh-sungguh dan melalui jalan halal dalam mencari nafkah, yang mana hal tersebut akan menunjukkan eksistensi manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhannya serta dapat menunaikan fungsinya sebagai khalifah sekaligus hamba Allah SWT yang senantiasa mengabdikan kepada-Nya.

Islam merupakan agama yang kaffah, yang mengatur segala aspek kehidupan untuk kelangsungan hidup manusia, baik dalam aspek dunia maupun akhirat. Muamalah adalah satu bagian dari Hukum Islam yang mengatur secara langsung yang berhubungan dengan tata cara hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas manusia itu seperti kerjasama dalam segala bidang, jual beli, sewa menyewa, upah ijarah, pinjam meminjam dan lain sebagainya.

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia dapat melakukan pekerjaan pada bidang usaha miliknya sendiri atau

⁴ *Ibid*,h.979.

⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Pasal 1 ayat

dapat melakukannya pada usaha milik orang lain dengan kesepakatan kerjasama. Dalam melakukan kerjasama tersebut, para pihak haruslah mengikuti dan berpegang pada ketentuan yang telah diatur dalam ketentuan hukum yang dianut, yaitu mengacu pada Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menjamin keberlangsungan akad kerjasama tersebut tetap dalam konteks yang dibenarkan dan tidak menyimpang.

Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan masyarakat pada masa sekarang ini adalah dalam lingkup penggarapan lahan. Penggarapan lahan ini sendiri pada dasarnya memiliki dua metode, yaitu: (1) dapat diolah sendiri oleh pemilik lahan, yang mana pemilik lahan harus menyediakan sendiri modal dan tenaganya dalam mengelola, selanjutnya (2) dengan cara meminjamkan lahan tersebut kepada orang lain untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi dua berdasarkan akad yang disepakati.

Kerjasama dan membagi hasil itu hal yang tidak dapat dipisahkan dan sudah biasa dilakukan oleh manusia sehari-hari, tanpa kerjasama manusia tidak bisa hidup sendiri. Bagi hasil dalam kerjasama di bolehkan dan dianjurkan dalam Islam. Dalam penelitian ini di fokuskan kerjasama pengelolaan lahan dalam bidang perkebunan, kerjasama dalam bidang perkebunan terbagi menjadi dua yaitu *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*.

Kerjasama pengelolaan lahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah termasuk ke arah bagi hasil *Al-Mukhabarah*. *Mukhabarah* adalah akad usaha kerjasama untuk mengerjakan tanah, baik sawah maupun ladang dengan perjanjian yang telah disepakati bersama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dimana modal penggarapan tanah ditanggung oleh penggarap tanah dan hasilnya dibagi menurut

kesepakatan bersama serta bibit yang ditanam berasal dari pemilik tanah.⁶

Kerjasama yang terjadi di Hutan Kawasan di Register 17 Kelurahan Serengsem Panjang Bandar Lampung yang memiliki hutan seluas 180 Ha. Hutan Kawasan tersebut sudah sejak tahun 1965 dan menjadi hutan kemasyarakatan yang di manfaatkan oleh sebagian besar penduduk Kelurahan Serengsem di Register 17 untuk membuka lahan dan bercocok tanam, selain itu di Hutan Kawasan di Register 17 Kelurahan Serengsem juga ada orang-orang yang melakukan kerjasama yakni dalam kerjasama pengelolaan lahan di bidang perkebunan. Jadi pada Hutan Kawasan di Register 17 Kelurahan Serengsem jika mereka ingin mengelola lahan untuk bertani maka mereka harus terlebih dahulu membuat surat persil. Surat persil ini berfungsi untuk pemetaan tanah dalam buku, dalam surat persil akan menunjukan titik-titik batas tertentu dari suatu bidang tanah atau lahan sesuai data yang sudah tercatat.

Namun dalam praktik kerjasama dilapangan masih ada yang tidak sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku. Yang diteliti oleh peneliti adalah praktik kerjasama yang dilakukan oleh pemilik izin mengelola lahan yang di buktikan dengan kepemilikan surat persil dengan petani yang sudah lebih dulu menanam atau mengelola lahan yang ada pada hutan kawasan di Register 17 Kelurahan Serengsem tanpa adanya surat persil karena mereka memang bertempat tinggal dekat dengan hutan kawasan tersebut. Setelah beberapa lama petani berkebun di hutan kawasan kemudian pemilik izin mengelola lahan datang mengklaim lahan tersebut karena sudah ada tanaman musiman di lahan tersebut maka pemilik izin melakukan kerjasama dengan petani yang sudah lebih dulu mengelola lahan tersebut karena jika tidak melakukan kerjasama maka pihak petani meminta tanaman yang sudah

⁶ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Surabaya: Gemilang Publishe, 2018), h. 161.

ditanam untuk di bayar oleh pemilik izin mengelola lahan, jadi pihak pemilik izin lebih memilih melakukan kerjasama pengelolaan lahan.

Dalam sistem kerjasama yang dilakukan pihak pemilik izin dan pengelola lahan adalah sistem *mukhabarah* yaitu ada sebidang tanah yang dikelola oleh dua pihak yaitu pihak pemilik izin lahan dan pihak pengelola lahan, pihak pemilik izin lahan menyerahkan lahan untuk digarap oleh pihak pengelola lahan untuk benih dan biaya perawatan dibiayai oleh pihak pengelola lahan dan dalam pelaksanaannya ada indikasi ketidaksesuaian dengan ketentuan kerjasama ini dalam sistem *mukhabarah* yaitu pembagian hasil panen yang tidak adil dan jangka waktu kerjasama yang tidak jelas waktu berakhirnya.

Yang menjadi permasalahan peneliti sekarang bagaimana praktik kerjasama dalam pengelolaan lahan pada hutan kawasan di Register 17 Kelurahan Serengsem ini, dan bagaimana sudut pandang hukum Islam dalam praktik kerjasama pengelolaan lahan pada hutan kawasan ini. Melihat dari penjelasan diatas bahwa dalam kerjasama ini merugikan salah satu pihak yaitu pengelola lahan.

Berangkat dari latar belakang diatas penulis ingin mengangkat ini dalam bentuk skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Pengelolaan Lahan di Hutan Kawasan (Studi Kasus Pada Hutan Kawasan, Register 17, Kelurahan Serengsem, Panjang, Bandar Lampung)”.

C. Fokus Penelitian

Yang dimaksud fokus penelitian ini yaitu memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data. Sehingga penelitian ini akan fokus memahami masalah yang menjadi tujuan penelitian, melalui fokus penelitian ini suatu informasi dilapangan dapat disaring sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus

penelitian ini yaitu praktik kerjasama pengelolaan lahan di hutan kawasan dalam tinjauan Hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, mulai nampak jelas bahwa penulis merumuskan pokok masalah untuk dijadikan penelitian dan pengkajian secara ilmiah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik kerjasama pengelolaan lahan pada hutan kawasan di Register 17 Kelurahan Serengsem Panjang Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama pengelolaan lahan pada Hutan Kawasan di Register 17 Kelurahan Serengsem Panjang Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas yang dimaksud tujuan penelitian pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik kerjasama pengelolaan lahan pada hutan kawasan di Register 17 Kelurahan Serengsem Panjang Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama pengelolaan lahan pada hutan kawasan di Register 17 Kelurahan Serengsem Panjang Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dimaksud dalam penelitian penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini adalah sebagai ilmu pengetahuan untuk pengembangan kajian Hukum Islam dalam Muamalah guna memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai praktik kerjasama pengelolaan lahan pada Hutan Kawasan. Selain itu diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca dan penulis sehingga memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai bahan bacaan baru, bagi yang memerlukan baik dari mahasiswa/mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Didalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil penelitian yang telah dibuat sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk menghindari terjadinya penelitian ulang dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah diteliti, jadi peneliti mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Darli Saputra program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul “Akad Jual Beli Hasil Perkebunan dari Kawasan Hutan Lindung Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Kasus Kawasan Hutan Lindung Register 17 Batu Serampok Lampung Selatan”, menjelaskan bahwa praktik akad jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung adalah barang yang berasal dari kawasan hutan lindung dan Register 17 Batu Serampok yang belum memperoleh izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHkm).

Akad jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung ini menurut Hukum Islam dilarang dikarenakan masuk kedalam kategori jual beli *fudhul* dimana objeknya tidak memenuhi syarat dalam jual beli yaitu barang yang diperjualbelikan harus dimiliki secara penuh dan orang yang berkuasa untuk menyerahkan barang serta penjual tidak menaati ulil amri dan menurut Hukum Positif tidak diperbolehkan karena penjual selaku penggarap lahan hutan lindung sebagai perkebunan telah melanggar peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum sehingga jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung tidak memenuhi syarat dalam jual beli atau jual beli ini dilarang.⁷ Persamaan dari skripsi ini adalah dengan yang peneliti bahas yaitu sama-sama membahas tentang hutan kawasan dan perbedaan ada pada bahasannya yang membahas mengenai jual beli sedangkan yang peneliti bahas adalah mengenai praktik kerjasama pengelolaan lahan pada hutan kawasan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Robi'atul Muthoharoh program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan Di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi", menjelaskan bahwa setelah dianalisis sesuai hukum Islam terhadap akad perjanjian kerjasama penggarapan lahan hutan di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, dari segi rukun dan syarat sudah sesuai dengan hukum Islam dan sah menurut *Syara'* dan pelaksanaan kerjasama tersebut termasuk dalam akad *muzara'ah* karena modal dan benih berasal dari pihak perhutani

⁷ Darli Saputra, *Akad Jual Beli Hasil perkebunan dari Kawasan Hutan Lindung Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019), h 94.

sedangkan penggarap hanya memberikan tenaganya untuk menggarap lahan hutan tersebut.⁸

Kemudian menurut Hukum Islam pembagian hasil anantara petani penggarap dengan pihak perhutani tidak sah, karena di awal akad belum adanya pembahasan mengenai pembagian hasil dari tanaman tegakan. Walaupun sudah ada rencana untuk melaksanakan bagi hasil dari tanaman tegakan tersebut. Seharusnya isi perjanjian tersebut haruslah jelas dan terang, tidak mengandung unsur kesamaran atau penipuan yang tersembunyi di balik perjanjian. Apabila terdapat kesamaran didalam perjanjian maka akan menimbulkan hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang dapat menimbulkan permusuhan dikemudian hari, akibat dari perjanjian tersebut yang dilaksanakan secara tidak jelas. Cara seperti ini diharamkan dalam *Muzara'ah* karena mengandung *gharar* (ketidak jelasan), sebab boleh jadi salah satu pihak dirugikan, karena adanya ketidakjelasan dalam pembagian hasil penggarapan.⁹ Persamaan dari skripsi ini dengan yang peneliti bahas adalah sama-sama menjelaskan kerjasama pengelolaan lahan dan perbedaannya ada pada objek dan tempat kerjasamanya dalam skripsi ini membahas kerjasama pada hutan di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi sedangkan yang peneliti bahas adalah kerjasama pengelolaan lahan pada hutan kawasan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Syarifah Nurul Faridah program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, dengan judul Skripsi “Implementasi Akad *Mukhabarah* Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Padang

⁸ Robi'atul Muthoharoh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap kerjasama Penggarapan lahan Hutan di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi*, (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo, 2018), h 84.

⁹ *Ibid*, h. 85.

Kabupaten Aceh Tengah. Setelah melakukan penelitian di lima Kelurahan di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh tengah, penulis Skripsi ini menyimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan kerjasama dengan akad *bagi due tanoh* yang sempat mirip dengan konsep *Mukhabarah* dalam Islam, hana saja pada prektiknya terdapat beberapa kekeliruan dalam akada tersebut. Dalam Islam akad lisan memang diperbolehkan dan sah, namun ketidakpedulian masyarakat mengenai pentingnya perjanjian tertulis juga dapat berpotensi terjadi beberapa permasalahan di kemudian hari, salah satunya tidak dijelaskan jangka waktu dalaml perjanjian. Disisi lain, metode pembagian hasil yang terjadi diantara pemilik lahan lahan dan pengelola dengan cara membagikan lahan kepunyaan si pemilik merupakan suatau yang juga dilarang dalam Islam.¹⁰

Kemudian dalam tinjauan Hukum Islam, ketidakseimbangan terjadi pada posisi kedudukan para pihak. Dalam kerjasama, seharusnya pihak memiliki kedudukan yang sama, yaitu seorang sebagai pemilik lahan, sementara yang lainnya merupakan pekerja yang mengolah lahan. Namun berdasarkan praktik yang dilakukan masyarakat, posisi pengelola menjadi lebih tinggi (*superior*) dibandingkan pihak pemilik lahan. Hal ini dilihat dari hak-hak yang diperoleh pengelola lahan dan keuntungannya yang lebih banyak dari pemilik lahan sendiri. Walau hal ini sudah biasa berlaku di tengah masyarakat, namun dari segi hukum Islam hal tersebut tidak diperbolehkan, karena terdapat ketidakadilan dan dapat menjurus hingga menzalimi salah satu pihak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kerja sama yang diperbolehkan dalam Islam adalah kerja sama yang

¹⁰ Syarifah Nurul Faridah, *Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah*, (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017), h. 65.

memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak dan mengikuti aturan yang diperbolehkan Islam.¹¹ Persamaan dari skripsi ini dengan yang peneliti bahas adalah sama-sama menjelaskan kerjasama pengelolaan lahan dan perbedaannya ada pada objek dan tempat kerjasamanya dalam skripsi ini membahas kerjasama pada perkebunan kopi sedangkan yang peneliti bahas adalah kerjasama pengelolaan lahan pada hutan kawasan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau mekanisme dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi dan data, sehingga dapat dijadikan suatu aspek yang paling penting dalam melakukan penelitian. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini diklasifikasikan menjadi penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya, yaitu penyelidikan empiris dengan menggunakan data konkret. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara melibatkan diri pada objek riset atau tanpa melibatkan diri pada objek riset.¹²

Adapun dalam hal ini, peneliti turun langsung meneliti ke lapangan yaitu di Hutan Kawasan di Register 17 Kelurahan Serengsem, Panjang Bandar Lampung untuk meneliti kegiatan kerjasama pengelolaan lahan yang mereka lakukan di hutan kawasan tersebut. Selanjutnya peneliti akan menguraikan dan menjelaskan serta menganalisis data yang diperoleh.

¹¹ *Ibid*, h. 66.

¹² Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2007), h. 183.

Penelitian ini diklasifikasi menjadi penelitian bersifat deskriptif-analisis, yang dimaksud adalah dengan memaparkan sumber data yang berkaitan dengan pembahasan, kemudian dikaji dan selanjutnya dianalisis menggunakan kerangka teori yang sudah dibangun.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah suatu data yang diperoleh dari sumber data itu sendiri. Sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan. Sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan melalui tahap mewawancarai para pihak yang terkait dan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua (2) yaitu meliputi :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain).¹³ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari tempat penelitian dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak pengelola lahan dan pihak pemilik izin mengelola lahan yang melakukan kerjasama pada hutan kawasan di Register 17 Kelurahan Serengsem.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku, majalah, makalah dan sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang

¹³ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), h.73

dimaksud.¹⁴ Adapun sumber data ini didapat melalui riset dari buku di perpustakaan maupun internet atau jurnal dengan rujukan buku *Fiqh Muamalah* karya Hendi Suhendi.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sebagian objek yang diselidiki dari keseluruhan individu peneliti, karena populasi yaitu keseluruhan objek peneliti.¹⁵ Keseluruhan subjek penelitian beberapa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola pikir, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. Supaya lebih objektif, dapat diperoleh melalui bermacam-macam sumber informasi lembaga, institusi, komunitas, penduduk, masyarakat dan lain sebagainya tentang populasi tersebut didapatkan melalui dokumen-dokumen. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 110 orang terdiri dari pemilik izin mengelola lahan dan petani yang mengelola lahan di hutan kawasan di Register 17 Kelurahan Serengsem Panjang Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk itu penulis dalam hal ini menggunakan pengambilan sampel berdasarkan buku Dr. Suharsini Arikunto yang menyebutkan apabila subjeknya lebih dari 100, lebih baik diambil antara 10%-15% atau 20%-25%. Oleh sebab itu, karena populasi lebih dari 100 orang dengan perhitungan sebagai berikut; $(110 \times 10\% = 11)$ maka penulis meneliti sebanyak 11 orang yang terdiri dari 2 orang yang memiliki izin untuk mengelola lahan dan 9

¹⁴ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). H. 58

¹⁵ *Ibid.*h. 57.

orang pengelola lahan yang melakukan kerjasama pada hutan kawasan di Register 17 Kelurahan Serengsem Panjang Bandar Lampung sebagai sampel.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan beberapa pendekatan antara lain yakni :

a. *Interview* / Wawancara

Interview atau sering juga di sebut dengan wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*Interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁶ *Interview* ini dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dari pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah para petani yang mengelola lahan dan sudah melakukan kerjasama dalam pengelolaan lahan dan para pemilik izin pengelolaan lahan pada hutan kawasan di Register 17 Kelurahan Serengsem Panjang Bandar Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau *variable* berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.¹⁷ Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi data dan fakta yang terkait dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Yang diteliti mengenai kependudukan, demografi, monografi, serta melampirkan foto-foto yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 198.

¹⁷ *Ibid*, h.188.

5. Metode Pengolahan Data

Tahap selanjutnya setelah semua data telah terkumpul adalah mengolah data, adapun metode pengolahan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Editing

Editing dalam hal ini adalah untuk memeriksa dan mengoreksi kembali terhadap data-data dan sumber-sumber yang telah diproses, yang kemudian dapat dibenarkan apabila terdapat kalimat atau kata yang tidak sesuai dalam penelitian ini.

b. Sistemating

Melakukan pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

6. Analisa Data

Analisa data adalah menguraikan atau memecahkan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil, agar dapat membandingkan salah satu dan beberapa komponen dengan keseluruhan atau secara persentase.¹⁸ Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian tentang praktik kerjasama pengelolaan lahan di hutan kawasan.

Setelah semua data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif. Yang dimaksud dengan deskriptif disini adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka-angka¹⁹ atau suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis.

¹⁸ Susiadi, *Metodologi Penelitian Fakultas Syari'ah dan Hukum*, (Bandar Lampung, 2014), h. 7.

¹⁹*Ibid.*

Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dari permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan mengutamakan cara berpikir deduktif.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya tulis dengan memakai sistematika pembahasan yang dapat merangkum keutuhan seluruh pokok pembahasan diatas. Oleh karena itu, uraian dalam bentuk tulisan ini akan dibagi menjadi empat lima bab. Masing-masing bab dirincikan lagi dalam sub bab sebagai pelengkap.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi beberapa pembahasan yang meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah bab yang membahas tentang teori yang digunakan dalam skripsi ini meliputi pengertian *mukhabarah*, landasan hukum *mukhabarah*, rukun dan syarat *mukhabarah*, dan hikmah *mukhabarah*. Dalam bab ini juga ada teori mengenai pengertian hutan kawasan, dasar hukum hutan kawasan, dan penatagunaan hutan kawasan.

Bab tiga adalah bab yang membahas tentang sejarah singkat dan letak geografis mengenai Hutan Kawasan di Register 17 di Kelurahan Serengsem, Panjang, Bandar Lampung dan juga mengenai praktik kerjasama pengelolaan lahan pada Hutan Kawasan di Register 17 di Kelurahan Serengsem, Panjang, Bandar Lampung.

Bab empat merupakan bab yang membahas mengenai analisis atas praktik kerjasama dalam pengelolaan lahan pada Hutan Kawasan di Register 17 di Kelurahan Serengsem, Panjang, Bandar Lampung. Dan juga membahas mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kerjasama dalam

pengelolaan lahan pada Hutan Kawasan di Register 17 di Kelurahan Serengsem.

Bab lima diisi dengan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. Bab lima ini sebagai penutup karena dalam bab ini akan menjawab permasalahan yang diajukan pada bab pertama, selanjutnya akan ada rekomendasi untuk usaha memperbaiki dan menyempurnakan objek penelitian.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab yaitu *al-adq* yang berarti perikatan, perjanjian, pemufakatan dan transaksi. Menurut *Dectonary of Business Term*, akad merupakan sebuah kesepekatan yang mengikat dua pihak atau lebih secara hukum, dalam melakukan pertimbangan maupun untuk melakukan suatu hal tertentu.²⁰ Dan menurut kaidah fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan perikatan) dan kabul (pernyataan menerima perikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak lain.²¹ Akad pula dapat terlaksana apa bila unsur-unsurnya terpenuhi, yaitu unsur-unsur yang bergantung padanya keberadaan suatu akad itulah yang disebut sebagai rukun.²²

Bentuk jamak dari *al-aqd* dalam bahasa Arab adalah *al-uqud* yang memiliki beberapa arti, antara lain :

²⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 72.

²¹ Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani. “Akad Jual Beli dalam Perspektif fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”. *Jurnal Al-‘Adalah*. Vol. 12 No 2 2015. (Bandar Lampung Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2015). (online). Tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214>. (24 Juni 2021). h. 786.

²² Muhammad Maksum. “Model-Model Kontrak Dalam Produk Keuangan Syariah”. *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 12 No. 1 2014. (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), (online). Tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/174/414>. (24 Juni 2021). h. 67.

- a. Mengikat (*al-rabith*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan menyimpulkan/mengikat keduanya agar menjadi sepotong benda.
- b. Sambungan (*al-'aqd*), yaitu berarti sambungan yang memegang kedua ujung, lantas mengikat.²³
- c. Janji (*al-ahd*), seperti yang tercantum dalam Q.S 3:76 berikut :

بَلْ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya : Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Ali-Imran : 76)

Berdasarkan keterangan diatas, di simpulkan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah perjanjian, perikatan, dan persetujuan dua belah pihak atau lebih terhadap suatu hal.

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak *Haq dan Itlizam* yang di wujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:

- 1) *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan suatu kepada pihak lain yang terdiri dari beberapa

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986), h. 44.

orang. Seseorang yang berakad terkadang memiliki hak dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.

- 2) *Mu'qud alaih* ialah benda-benda yang di akadkan, seperti badan yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang di jamin seseorang dalam kafalah.
- 3) *Maudhu' al'aqd* ialah tujuan pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) *Sighat al'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab merupakan permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambar kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab.²⁴

b. Syarat Akad

- 1) Pelaku akad cakap bertindak.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diperbolehkan syara' dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya walaupun aqid yang memiliki barang.
- 4) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Oleh karena itu akad menjadi batal bila ijab dicabut kembali sebelum adanya kabul.

3. Macam-macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi jika dilihat dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut *syara'*, maka akad terbagi menjadi dua yaitu :

²⁴ Hendi suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 44.

- a. Akad Sahih, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.
- b. Akad yang tidak sah, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiah membagi dua macam yaitu akad yang fasad dan akad yang bathil. Akad yang bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan *syara'*. Sedangkan akad fasad adalah pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diadakan tidak jelas.

4. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir jika:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad itu, jika akad itu memiliki tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak yang berakad, jika akad itu bersifat tidak mengikat.
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dianggap berakhir apabila:
 - a) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan atau salah satu syarat tidak terpenuhi.
 - b) Berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar rukyah.
 - c) Akad itu tidak di laksanakan oleh satu pihak.
 - d) Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam para Ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya

salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad kerjasama.²⁵

B. Kerjasama Dalam Pertanian (*Mukhabarah*)

1. Pengertian Mukhabarah

Secara bahasa *Mukhabarah* memiliki pengertian “tanah gembur” atau “lunak”.²⁶ *Muzara’ah* disebut juga *Mukhabarah* yang berarti Al-Inbat, artinya menumbuhkan.²⁷

Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. *Mukhabarah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap di mana benih tanamannya berasal dari penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dengan imbalan tertentu dari hasil panen.²⁸

Secara istilah pengertian *Muzara’ah* dan *Mukhabarah* ada beberapa pendapat yang berbeda dari ulama-ulama besar.

Menurut ulama Hanafiyah, *Muzara’ah* adalah “Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi”. Menurut ulama Syafi’iyah “*Mukahabarah* adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola, adapun *Muzara’ah* adalah sama dengan *Mukhabarah* hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah”.²⁹ Menurut Ulama Hanabilah “menyerahkan

²⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 35.

²⁶ Ahmad Munir Hamid dan Ni’matul Yuha, “Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah”. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 4 No. 1 Januari 2021, hal. 80.

²⁷ A.Khumiati Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Surabaya: Gemilang Publishe, 2018), h. 159.

²⁸ Ai Pipit Pitriani. “Tinjauan Fikih Muamalah Akad Mukhabarah dan UU No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian terhadap Pelaksanaan Maro Sawah antara Petani Penggarap dengan Pemilik Tanah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 6 No. 2 Tahun 2020, hal. 172.

²⁹ *Ibid.*

tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi di antara keduanya”.³⁰

Dari penjelasan di atas tersebut disimpulkan bahwa *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* adalah sama-sama berkerja sama dalam bidang tanah atau kebun, namun perbedaan terletak pada modal dimana pada *Muzara'ah* modalnya diberikan oleh pemilik tanah sedangkan *Mukhabarah* modalnya dari pengelola tanah atau kebun itu sendiri.

Kerjasama dan bagi hasil dalam bidang perkebunan sudah dijelaskan di Al-Qur'an sebagaimana dalam Q.S Az-Zukhruf ayat 32 :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

2. Landasan Hukum *Mukhabarah*

Dasar hukum yang digunakan ulama dalam menetapkan hukum *Mukhabarah* adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Thawus r.a.

³⁰ *Ibid*, h. 160.

أَنَّهُ يُخَا بِرُقَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتُ هَذِهِ
 الْمَخَابِرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
 الْمَخَابِرَةَ فَقَالَ أَخْبِرْنِي أَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ
 خَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِهَا خَرْجًا مَعْلُومًا. (رواه مسلم)

“Sesungguhnya Thawus r.a. bermukhabarah, Umar r.a. berkata; dan aku berkata kepadanya; ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi melarangnya. Kemudian Thawus berkata; telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw. Tidak melarang mukhabarah, hanya beliau berkata, bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah dimaklumi.”(HR.Muslim)³¹

Menurut pengarang kitab *al-Minhaj*, bahwa Mukhabarah yaitu mengerjakan tanah dengan mengambil sebagian dari hasilnya, sedangkan benihny adari pekerja dan tidak boleh pula *bermuzara'ah*, yaitu pengelolaan tanah yang benihnya dari pengelola tanah.³²

3. Rukun dan Syarat Mukhabarah
 - a. Pemilik tanah dan penggarap tanah, dalam hal ini disyaratkan baligh dan berakal (*Mumayyiz*).
 - b. Tanah garapan, dalam hal ini disyaratkan:
 - 1) Tanahnya jelas dan tidak bermasalah (sengketa).

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 2005), h. 157.

³² *Ibid*, h. 158.

- 2) Tanahnya memungkinkan untuk digarap, yakni apabila ditanami dapat menghasilkan.
- c. Modal atau biaya penggarapan (pengelola) tanah, dalam hal ini disyaratkan:
 - 1) Jelas nilainya
 - 2) Dapat dimanfaatkan
- d. Ijab Kabul (akad), dalam hal ini disyaratkan:
 - 1) Dilakukan atas kesepakatan bersama, yaitu antara pemilik tanah dan penggarap tanah.
 - 2) Tidak ada pihak yang dirugikan.
 - 3) Dapat diterima kedua belah pihak, artinya mungkin untuk dilaksanakan dan tidak terpaksa.³³
4. Mekanisme Pembagian Hasil Dalam *Mukhabarah*

Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, bahwasanya bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzara'ah dengan metode pembagian hasil $1/3 : 2/3$, $1/4 : 3/4$, $1/2 : 1/2$.³⁴

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen antara lain, yaitu:

- a. Hasil panen harus diketahui secara jelas didalam akad, karena nantinya hasil panen tersebut akan dijadikan upah. Apabila hasil tidak diketahui hal tersebut dapat merusak akad dan menjadikannya tidak sah.
- b. Status hasil panen adalah milik bersama dari kedua pihak. Tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen dikhususkan untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad.

³³ A.Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, h. 162.

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, Cetakan ke-2, 2013), h. 240.

- c. Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, yaitu boleh dengan cara setengah, sepertiga, seperempat atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan. Tidak ditentukannya kadar pembagiannya ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian hari.
- d. Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari keseluruhan dari keseluruhan panen. Misalnya jika disyaratkan bagian satu pihak (dalam jumlah spesifik, misal: 5 mudd), maka dianggap tidak sah. Karena, bisa saja hasil panen dari tanaman hanya menghasilkan sebanyak yang ditentukan satu pihak saja.³⁵

5. Berakhirnya Akad *Mukhabarah*

Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya dan *mukhabarah* antara lain adalah:

- a. Telah habis jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian
- b. Salah satu pihak meninggal dunia
- c. Adanya udzur. Menurut Ulama Hanafiyah, dianta udzur yang menyebabkan batalnya akad, yaitu :
 - 1) Tanah garapan terpaksa dijual, karena harus membayar hutang.
 - 2) Pengelola tidak dapat mengelola tanah, hal ini dapat terjadi karena pengelola sakit, jihad dijalan Allah SWT. dan lain-lain.³⁶
 - 3) Terjadi pembatalan akad karena alasan tertentu, baik dari pemilik tanah maupun dari pihak petani penggarap.³⁷

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 565.

³⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 211.

6. Hikmah *Mukhabarah*

Manusia banyak yang sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai sawah, tanah, lading, dan lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani) tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengelola lahan sawah dan ladangnya tersebut atau dia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan suatu apapun.³⁸ Berikut adalah hikmah dari kerjasama *Mukhabarah*:

- a. Tanah yang semula tersia-siakan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
- b. Dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi petani yang menganggur untuk memelihara tanah dan memperoleh hasilnya.³⁹
- c. Tanah yang semula tidak terawat dan tidak terpelihara oleh pemiliknya dapat dipelihara dan dikelola dengan baik.
- d. Dapat menimbulkan sikap tolong menolong dan kepedulian terhadap orang lain.
- e. Dapat menciptakan hubungan persaudaraan yang baik antara pemilik tanah dan penggarap tanah.⁴⁰

C. Landasan Kehutanan

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

³⁷ Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, Cet I, 2008), h.42-43.

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 2005), h. 159.

³⁹ A.Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, h. 163.

⁴⁰ *Ibid*, h. 154.

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Berdasarkan uraian diatas dikeluarkan pasal 50 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, menyatakan:

- a. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan
- b. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- c. Setiap orang dilarang:
 - 1) Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.
 - 2) Menambah kawasan hutan.
 - 3) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan hutan radius atau jarak sampai dengan:
 - a) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau.
 - b) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa.
 - c) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai.
 - d) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai.

- e) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang.
 - f) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- 4) Membakar hutan.
 - 5) Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
 - 6) Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
 - 7) Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri.
 - 8) Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
 - 9) Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang.
 - 10) Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang.
 - 11) Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
 - 12) Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta

membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan

13) Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

d. Ketentuan tentang mengeluarkan, ,ebawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau ssatwa yang dilindungi, diatar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan memberikan manfaat yang besar bagi manusia, maka karena itu hutan harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan keterkaitannya dengan dunia Internasional menjadi penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Berdasarkan uraian diatas bagi masyarakat yang ingin menggunakan kawasan hutan di tetapkan pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, berbunyi:

a. Pengelolaan Perhutanan Sosial terdiri atas:

- 1) HD;
- 2) HKm;
- 3) HTR;
- 4) Hutan Adat; dan
- 5) Kemitraan Kehutanan.

⁴¹ Kementerian Kehutanan, *Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016)

- b. Kemitraan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang dilaksanakan pada Hutan Konversi, diberikan dalam bentuk Kemitraan Konversi.
- c. Pada hutan lindung dapat diberikan persetujuan pengelolaan HD, HKm, dan/atau kemitraan kehutanan.
- d. Pada hutan produksi dapat diberikan persetujuan pengelolaan lahan HD, HKm, HTR dan/atau kemitraan kehutanan.
- e. Arahan areal pengelolaan perhutanan social sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk PIAPS.⁴²



⁴² Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Utama

- Al-Qur'an
Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: CV Diponogoro.
- Al-Hadist
Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. 2015. *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram (Petunjuk Rasulullah dalam Ibadah Muamalah dan Akhlak)*, (terj. Abdul Rosyad Siddiq). Jakarta: Akbar Media, Cet. IX.
Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. 2013. *Takhrij: Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani*, (terj. Muhammad Hanbal Shafwan), *Judul Asli "Bulughul Maram (Memaknai Hukum Dengan Dalil-dalil Shalih)"*. Sukoharjo: Al-Qowam, Cetakan Ke-1.

Sumber Buku

- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekkatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Citra.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattami). Jakarta: Gema Insani.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ichsan, Muhammad. 2015. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Laboraturium Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ilmy, Bachrul. 2008. *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Ja, far, A. Khumedi. 2018. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Surabaya: Gemilang Publishe.

- Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2007)
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamala*, Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana.
- Muslich, Ahmad Wandu. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. 2010. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. 2002. *Metode Penelitian*. Bandung: C.V Mandar Maju.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susiadi. 2014. *Metodologi Penelitian Fakultas Syariah dan Hukum*. Bandar Lampung.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tika, Muhammad Pabundu. 2006. *Metodelogi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal

- Hamid, Ahmad Munir dan Yuha, Ni'matul. 2021. Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No 1 Januari 2021. 80.
- Maksum, Muhammad. 2014. Model-Model Kontrak Dalam Produk Keuangan Syariah. *Jurnal Al- 'Adalah*, Vol. 12 No 1 2014. 67.
- Pitriani, Ai Pipit. 2020. Tinjauan Fikih Muamalah Akad Mukhabarah dan UU No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian terhadap Pelaksanaan Maro Sawah antara Petani Penggarap dengan Pemilik Tanah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No 2 Tahun 2020. 172.

Rachmawati, Eka Nuraini dan Ab Mumin bin Ab Ghani. 2015. Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Al- 'Adalah*, Vol. 12 No 2 2015. 786.

Sumber Skripsi

Faridah, Syarifah Nurul. 2017. *Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Muthoharoh, Robi'atul. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap kerjasama Penggarapan lahan Hutan di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo.

Saputra, Darli, 2019. *Akad Jual Beli Hasil perkebunan dari Kawasan Hutan Lindung Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Sumber Penunjang

Bakron. 2021. Wawancara tentang kerjasama pengelolaan lahan. Register 17 Kelurahan Serengsem.

Barudin. 2021. Wawancara tentang kerjasama pengelolaan lahan. Register 17 Kelurahan Serengsem.

Faisal. 2021. Wawancara tentang kerjasama pengelolaan lahan. Register 17 Kelurahan Serengsem.

Halimah. 2021. Wawancara tentang kerjasama pengelolaan lahan. Register 17 Kelurahan Serengsem.

Isnain. 2021. Wawancara tentang kerjasama pengelolaan lahan. Register 17 Kelurahan Serengsem.

Junet. 2021. Wawancara tentang kerjasama pengelolaan lahan. Register 17 Kelurahan Serengsem.

Kemad. 2021. Wawancara tentang kerjasama pengelolaan lahan. Register 17 Kelurahan Serengsem.

- Nurhayati. 2021. Wawancara tentang kerjasama pengelolaan lahan.
Register 17 Kelurahan Serengsem.
- Sakirin. 2021. Wawancara tentang kerjasama pengelolaan lahan.
Register 17 Kelurahan Serengsem.
- Samsudin. 2021. Wawancara tentang kerjasama pengelolaan lahan.
Register 17 Kelurahan Serengsem.
- Soleh. 2021. Wawancara tentang kerjasama pengelolaan lahan.
Register 17 Kelurahan Serengsem.
- Yadi. 2021. Wawancara tentang kerjasama pengelolaan lahan.
Register 17 Kelurahan Serengsem.

Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan
Perhutanan Sosial

